

Judul : Ketidakpekaan Pejabat di Tengah Derita Korban Bencana
Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

Ketidakpekaan Pejabat di Tengah Derita Korban Bencana

Bencana banjir dan longsor di Sumatera menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran di pemerintahan untuk mengevaluasi sistem penanggulangan bencana serta komunikasi publik yang lebih berempati.

Hidayat Salam

Di tengah kesulitan warga menghadapi bencana banjir dan longsor di Sumatera, sejumlah pejabat publik justru mempertontonkan sikap nirempati. Tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Ketidakpekaan ini sekaligus memperlihatkan adanya problem tata kelola penanganan bencana.

Pada 2 Desember 2025, ketika dampak bencana banjir dan longsor masih menyulitkan warga, Bupati Aceh Selatan Mirwan bersama keluarganya justru berangkat umrah. Sebelum itu, pernyataan Mirwan lebih dulu viral di media sosial karena menyampaikan ketidakpedulian menanggapi dampak bencana di daerahnya.

Alih-alih bersama warganya dalam menghadapi bencana, Mirwan justru meninggalkan mereka. Kepergiannya pun tanpa izin dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, seperti disyaratkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Akibatnya, Kemendagri menjatuhkan sanksi bagi Mirwan berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan dari jabatan Bupati Aceh Selatan. Sebelumnya, Partai Gerindra lebih dulu menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Mirwan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Ketidakpekaan Mirwan di tengah kesulitan warganya menghadapi bencana jadi dasar penjatihan sanksi tersebut.

Namun, tak hanya Mirwan. Setelah bencana di Sumatera terjadi, sejumlah pejabat lain juga memperlihatkan ketidakpekaan terhadap bencana yang

telah menewaskan lebih dari 900 orang tersebut. Ironisnya, ketidakpekaan itu sempat diperlihatkan pula oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang lembaganya telah dipercaya menjadi tulang punggung saat bencana terjadi.

Di saat awal bencana terjadi, Suharyanto justru menyatakan bahwa bencana di Sumatera sebatas mencekam di media sosial. Saat ia menyampaikan pernyataan itu, persisnya pada 28 November lalu, masih banyak wilayah terisolasi. Masih banyak pula warga yang terjebak banjir dan longsor hingga membutuhkan evakuasi.

Belakangan, ketidakpekaan juga muncul dari wakil rakyat di DPR. Di tengah kebutuhan cepat para penyintas bencana dan longsor pada bantuan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, justru menyindir bantuan yang datang dari masyarakat. Sindiran blak-blakan disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Gedung DPR, Senin (8/12/2025).

"Orang per orang cuma menyumbang Rp 10 miliar (ke daerah bencana), negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu. Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada yang baru datang, baru bikin satu posko, *ngomong* pemerintah enggak ada. Padahal, pemerintah bikin ratusan posko," ujar Endipat.

Meski tak disebutkan siapa individu yang dimaksudnya, sindiran itu ditangkap mengarah kepada Ferry Irwandi, pemengaruh sekaligus pendiri Malaka Project. Setelah ben-

cana di Sumatera melanda, Ferry menggalang bantuan dana publik melalui platform Kitabisa. Total donasi mencapai Rp 10,3 miliar dalam 24 jam pertama dengan partisipasi lebih dari 87.000 orang. Ia juga ikut terlibat mendistribusikan bantuan ke para penyintas.

Namun, Ferry merespons biasa cibiran dari Endipat tersebut, bahkan memaafkannya. "Beliau sudah menghubungi saya secara personal dan minta maaf. Saya juga menerima itu karena enggak ada gunanya juga memelihara konflik dalam situasi seperti sekarang," ujarnya.

Sementara Endipat beralasan, maksud pernyataannya untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Komdigi, terutama soal publikasi dan penyebaran informasi mengenai langkah penanganan bencana oleh negara. Ia mengaku tak berniat mengecilkan peran sukarelawan. Sukarelawan selalu bergerak tanpa pamrih setiap terjadi bencana. Mereka juga bekerja dengan hati, sedangkan negara bekerja dengan kewajiban, dan keduanya penting, tidak boleh dipertentangkan.

"Yang saya soroti adalah lemahnya komunikasi publik. Negara bekerja besar, tetapi tidak banyak diberitakan. Akibatnya, masyarakat hanya melihat apa yang viral, bukan apa yang sebenarnya dilakukan di lapangan," ujar Endipat, Selasa (9/12).

Kondisi riil bencana

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (CIIP), Adinda Tenriangkhe Muchtar melihat ketidakpekaan para

pejabat itu sekaligus menunjukkan ketidakpahaman mereka terhadap kondisi riil yang dialami oleh para penyintas bencana. Ketidakpekaan bisa jadi muncul karena mereka selama ini terlalu berorientasi pada pencitraan.

"Jadi, *mindset*-nya bukan peduli terhadap apa yang terjadi di masyarakat ataupun lingkungan, tapi malah mengutamakan mana yang paling disorot atau herkompetisi demi *exposure* di media sosial atau pencitraan. Jadi, salah kaprah komunikasi publiknya dan menjadi nirempati," tutur Adinda, Kamis (11/12).

Ketidakpekaan itu, menurut dia, juga menunjukkan adanya masalah pada tata kelola penanganan bencana yang lambat dan tidak sigap serta tidak tepat sasaran. Kelambanan dan ketidaksiapan akibat ketidakpekaan pada bencana itu termasuk yang terlihat di level pemerintah pusat.

Meski bencana banjir dan longsor sudah mulai melanda di sejumlah wilayah di Sumatera pada 24 November 2025, Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih baru menggelar rapat untuk membahasnya pada 27 November 2025. Setelah itu, penanggulangan bencana baru terlihat lebih cepat disertai kunjungan dua kali Presiden Prabowo di daerah bencana pada Senin (1/12) dan Minggu (7/12).

Berangkat dari problem ketidaksiapan itu, Adinda mendorong agar musibah di Sumatera jadi pelajaran seluruh jajaran di pemerintah untuk mengevaluasi sistem penanggulangan bencana. Ke depan, pemerintah diharapkan lebih cepat membantu masyarakat

ketika bencana terjadi.

Yang tak kalah penting, perlunya membangun sistem komunikasi publik yang solid, jelas, dan akurat. Selain itu, dalam situasi bencana, komunikasi publik juga harus empatik.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, juga menyayangkan ketidakpekaan sejumlah pejabat publik di tengah bencana. Mereka dinilai tidak belajar dari kemarahannya publik pada akhir Agustus lalu, yang dipicu buruknya komunikasi publik sejumlah pejabat dan ketidakpekaan mereka di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi warga.

Partai politik, menurut dia, ikut andil melahirkan ketidakpekaan karena sebagian pejabat publik yang kontroversial sikap dan pernyataannya saat bencana itu berasal dari parpol. Karena itu, parpol mesti memperbaiki sistem rekrutmen dan kaderisasi dengan menerapkan sistem merit dan pendidikan politik yang menumbuhkan sikap negarawan.

"Ini menunjukkan bukan hanya tiadanya kepekaan dan *sense of crisis*, melainkan juga gagalnya representasi politik atau juga bisa jadi mereka tidak ditempa oleh pendidikan politik yang matang," kata Lili.

Musibah di Sumatera menegaskan bahwa komunikasi publik yang keliru dan perilaku pejabat yang nirempati hanya menambah luka para penyintas. Pemerintah perlu memastikan bahwa dalam setiap langkah penanganan bencana, hadir kepemimpinan yang sensitif, sigap, dan benar-benar berpihak kepada penyintas.